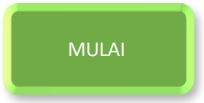
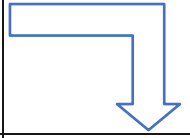
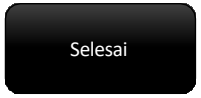
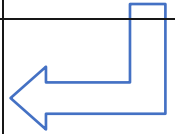
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**Nomor SOP**	W.31.AH.02.01-72
	Tanggal Pembuatan	11 MARET 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 MARET 2025
	Disahkan Oleh : **Kepala Kantor Wilayah** **Kementerian Hukum Papua Barat** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Piet Bukorsyom** **NIP. 1965 12271996101001**	
	Nama SOP	LAYANAN KONSULTASI APOSTILLE

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum & Ham Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Hukum & HAM. 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;. 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Jaringan internet; 3. Alat komunikasi. 4. Ruangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan bagi Notaris dan seterusnya. 2. Layanan bagi Notaris diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan bagi Notaris akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan notaris.

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan				
1.	Pemohon datang ke loket Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melakukan konsultasi			Meja, Kursi dan Laptop	5 menit	Petugas Layanan menerima pemohon	
2.	konsultasi mengenai pertanyaan, permasalahan dan kendala terkait Layanan Apostille dari pemohon			Berkas pengaduan	10 menit	Petugas Layanan menerima konsultasi	Layanan ini bersifat gratis
3.	Petugas Layanan memberikan tanggapan dan jawaban bagi pemohon				15 menit	Petugas Layanan memberikan solusi bagi pemohon	